Jurnal Akuntansi dan Bisnis
Vol. 15, No. 1, Februari 2015: 45-55
www.jab.fe.uns.ac.id

ANALISIS PENGARUH *CORPORATE GOVERNANCE* TERHADAP KINERJA LINGKUNGAN (STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN YANG TERDAFTAR DI BEI DAN BERPERINGKAT PROPER TAHUN 2011-2013)

TRI LESTARI SUHARYATI
ISNA PUTRI RAHMAWATI (isnaputrirahmawati@gmail.com)

Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Sebelas Maret

A B S T R A C T

This study aims to investigate the influence of corporate governance on environmental performance. The independent variables were tested in this study is the board size, the proportion of independent directors, the number of board meetings and the size of the audit committee, while the dependent variable in this study is the environmental performance. There are also variables that control the size, profitability, and leverage. The sample in this study is the manufacturing, mining, food and beverage companies listed on the Indonesian Stock Exchange and rated PROPER *during 2011–2013 with a total of 36 companies. The sample was selected using specific criteria or purposive sampling. Analysis of the hypothesis used in this study using multiple linear regression. The results showed that the variable proportion of independent directors is significantly influence the company's environmental performance, while the board size, number of board meetings and audit committee size does not influence the performance of the environment. Profitability control variables also influence the environmental performance, while size and leverage does not influence the performance of the environment.*
Keywords: *Environmental performance, corporate governance,* PROPER, *profitability*

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti pengaruh *corporate governance* terhadap kinerja lingkungan. Variabel independen yang diuji dalam penelitian ini adalah ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit, sedangkan variabel dependen dalam penelitian ini adalah kinerja lingkungan. Terdapat juga variabel kontrol yaitu *size*, profitabilitas, dan *leverage*. Sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan *food* dan *beverage,* manufaktur, dan tambang yang terdaftar di BEI dan berperingkat PROPER selama tahun 2011-2013 dengan total sebanyak 36 perusahaan. Sampel dipilih menggunakan kriteria tertentu atau *purposive sampling.* Analisis dalam penelitian ini menggunakan uji regresi berganda. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel proporsi komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap kinerja lingkungan perusahaan, sedangkan ukuran dewan komisaris, jumlah rapat dewan komisaris, dan ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Variabel kontrol profitabilitas juga berpengaruh terhadap kinerja lingkungan, sedangkan *size* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan.
Kata Kunci: Kinerja lingkungan, *corporate governance,* PROPER, profitabilitas

PENDAHULUAN

Gagasan *corporate social responsibility* (CSR) menekankan bahwa tanggung jawab perusahaan bukan sekedar dalam bidang ekonomi saja, melainkan juga tanggung jawab sosial dan lingkungan. Dasar pemikirannya adalah bahwa menggantungkan semata-mata pada kesehatan finansial tidak menjamin perusahaan akan tumbuh secara berkelanjutan (Djatmiko 2006). Elkington (1997) merumuskan *tripple bottom line* dimana operasi perusahaan memiliki keterkaitan dengan lingkungan dan manusia yang dipengaruhi oleh faktor manusia dan masyarakat (*people*), nilai ekonomi dan keuntungan (*profit*), serta faktor lingkungan (*planet*).

Praktik tanggung jawab sosial perusahaan merupakan implementasi konsep *Corporate Governance* dalam etika bisnis dan pedoman perilaku yang terdapat dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia, yang menyatakan bahwa perusahaan perlu memperhatikan kepentingan *stakeholders*-nya, sesuai dengan aturan yang ada dan menjalin kerja sama yang aktif dengan *stakeholders*-nya demi kelangsungan hidup jangka panjang perusahaan (Utama 2007). Said *et al.* (2009) menyatakan *corporate governance* (CG) sangat efektif untuk memastikan bahwa kepentingan *stakeholders* telah dilindungi. Oleh karena itu, perusahaan harus mengungkapkan kinerja ekonomi, sosial, dan lingkungan perusahaan terhadap para *stakeholder*. Penerapan konsep *Good Corporate Governance* diharapkan dapat meningkatkan pelaksanaan dan pengungkapan tanggung jawab sosial perusahaan (Daniri 2008c).

Penelitian ini dimotivasi oleh penelitian Stuebs dan Sun (2014) yang menemukan bahwa *corporate governance* berpengaruh positif terhadap *corporate environmental activity.* Stuebs dan Sun (2014) juga menemukan bahwa *corporate governance* secara signifikan berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Di Indonesia, penelitian mengenai *corporate governance* dan kinerja lingkungan menunjukkan hasil bahwa proporsi komisaris independen dan jenis industri berpengaruh positif dengan kinerja lingkungan, ukuran dewan komisaris berpengaruh negatif terhadap kinerja lingkungan (Yesika 2013). Sedangkan profitabilitas, *leverage*, dan jumlah pertemuan komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan (Yesika 2013). Alasan lain yang mendorong peneliti untuk melakukan penelitian mengenai *Corporate Governance* dan Kinerja Lingkungan adalah belum banyak peneliti yang meneliti topik penelitian tersebut.

Penelitian ini didasarkan pada penelitian Stuebs dan Sun (2014), dengan beberapa perbedaan yang salah satunya adalah menyesuaikan proksi *corporate governance* pada penelitian sebelumnya dengan proksi *corporate governance* sesuai Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006. Perbedaan selanjutnya adalah pada sampel penelitian, dimana sampel pada penelitian sebelumnya menggunakan data yang berasal dari perusahaan yang terdaftar pada *Investor Responsibility Research Center, Inc's* (IRRC's) dan *Russel 3000 index.* Sampel yang digunakan dalam penelitian ini berasal dari perusahaan *food* dan *beverage*, manufaktur dan tambang yang terdaftar pada Bursa Efek Indonesia (BEI). Selanjutnya metode yang digunakan untuk mengukur kinerja lingkungan, pada penelitian yang dilakukan Stuebs dan Sun (2014) menggunakan data yang berasal dari Kinder, Lydenberg dan Domini (KLD *database*). Sedangkan penelitian ini menggunakan data peringkat PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Alasan peneliti menggunakan data peringkat PROPER adalah peringkat PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan memiliki landasan peraturan yang jelas yaitu Keputusan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 127 Tahun 2002.

Dalam penelitian ini, peneliti memilih sampel pada perusahaan *food* dan *beverage*, manufaktur, dan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) serta berperingkat dalam PROPER tahun 2011-2013. Alasan peneliti memilih perusahaan manufaktur dan tambang adalah perusahaan *food* dan *beverage*, manufaktur, dan tambang, dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan yang relatif tinggi sehingga pengukuran kinerja lingkungan sangat diperlukan oleh perusahaan. Periode yang digunakan adalah tiga tahun yaitu dari tahun 2011 sampai 2013 karena peneliti menganggap data di tahun 2011 sampai 2013 sudah dapat memenuhi sampel yang dibutuhkan dalam penelitian.

Tujuan penelitian ini adalah ingin menguji secara empiris apakah *corporate governance* yang diproksikan menjadi ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris dan ukuran komite audit memberikan pengaruh positif terhadap kinerja lingkungan. Selain ittu penelitian ini diharapkan memberi manfaat bagi para perusahaan untuk pertimbangan dalam melaksanakan kinerja lingkungan.

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

Corporate Governance

Menurut *Finance Committee on Corporate Governance* dalam Effendi (2009), *corporate governance* merupakan proses dan struktur yang digunakan untuk mengarahkan dan mengelola bisnis serta aktivitas perusahaan ke arah peningkatan pertumbuhan bisnis dan akuntabilitas perusahaan. Solihin (2009) menyatakan bahwa salah satu implementasi GCG di perusahaan adalah penerapan CSR. Hal ini karena implementasi CSR juga menjadi salah satu prinsip pelaksanaan GCG. Sebagaimana dijelaskan dalam Pedoman Umum GCG Indonesia khususnya prinsip responsibilitas dinyatakan bahwa perusahaan harus mematuhi perundang-undangan serta melaksanakan tanggung jawab terhadap masyarakat dan lingkungan sehingga dapat terpelihara kesinambungan usaha dalam jangka panjang dan mendapat pengakuan sebagai *good corporate citizen*.

Ukuran Dewan Komisaris

Jumlah anggota dewan komisaris yang dimiliki oleh perusahaan terdiri dari: komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris. Undang-Undang Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 108 ayat 5 menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas wajib memiliki paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris. Oleh karena itu, jumlah anggota dewan komisaris di Indonesia bervariasi disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan efektivitas dalam pengambilan keputusan.

Proporsi Komisaris Independen

Komisaris independen adalah komisaris yang bukan anggota manajemen, pemegang saham mayoritas, pejabat atau dengan cara lain berhubungan langsung atau tidak langsung dengan pemegang saham saham mayoritas dari suatu perusahaan yang mengawasi pengelolaan perusahaaan (Surya dan Yustivanda 2006).

Komisaris independen diharapkan mampu menempatkan keadilan (*fairness*) sebagai prinsip utama dalam memperhatikan kepentingan pihak-pihak yang mungkin sering terabaikan, misalnya pemegang saham minoritas serta para *stakeholders* lainnya, sebab komisaris independen harus bebas dari kepentingan dan urusan bisnis apapun yang dapat dianggap sebagai campur tangan untuk bertindak demi kepentingan yang menguntungkan perusahaan (Linoputri 2010).

Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Rapat dewan komisaris merupakan suatu proses untuk pengambilan keputusan mengenai kebijakan perusahaan. Rapat dewan komisaris merupakan media komunikasi dan koordinasi diantara anggota-anggota dewan komisaris dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Dalam rapat tersebut, akan membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, evaluasi kebijakan yang telah diambil atau dilakukan oleh manajemen, dan mengatasi masalah benturan kepentingan (Ratnasari dan Prastiwi 2011).

Ukuran Komite Audit

Dalam rapat yang dilakukan oleh dewan komisaris, akan terbentuk suatu komite yang akan mengaudit manajemen dan jalannya perusahaan. Nasution dan Setiawan (2007) menyatakan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan. Keberadaan komite audit sangat penting bagi pengelolaan perusahaan

Corporate Social Responsibility (CSR)

CSR merupakan tanggung jawab sosial korporat, yakni tanggung jawab sosial perusahaan kepada seluruh stakeholders, pada setiap organisasi laba atau nirlaba, tingkat manajemen puncak, dengan skala besar, skala lokal, nasional, regional atau global. Adapun alasan penting mengapa harus melakukan CSR adalah untuk mendapatkan keuntungan sosial, mencegah konflik dan persaingan yang terjadi, kesinambungan usaha/bisnis, pengelolaan sumber daya alam serta perberdayaan masyarakat.

Kinerja Lingkungan

Dalam penelitian ini digunakan pengukuran kinerja lingkungan sesuai dengan peringkat PROPER yang dikeluarkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup. Kriteria penilaian PROPER terdiri dari dua kategori, yaitu kriteria penilaian ketaatan dan kriteria penilaian lebih dari yang dipersyaratkan dalam peraturan (*beyond compliance*). Kriteria penilaian ketaatan menjawab pertanyaan apakah perusahaan sudah taat terhadap peraturan pengelolaan lingkungan hidup. Peraturan lingkungan hidup yang digunakan sebagai dasar penilaian saat ini adalah peraturan yang berkaitan dengan Persyaratan Dokumen Lingkungan dan Pelaporannya, Pengendalian Pencemaran Air, Pengendalian Pencemaran Udara, Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3), Pengendalian Pencemaran Air Laut dan Potensi Kerusakan Laha

Pengembangan Hipotesis

Ukuran Dewan Komisaris dan Kinerja Lingkungan

UU Perseroan Terbatas Nomor 40 Tahun 2007 Pasal 108 ayat 5 menjelaskan bahwa bagi perusahaan berbentuk Perseroan Terbatas wajib memiliki paling sedikit dua orang anggota dewan komisaris. Menurut Pedoman Umum GCG Indonesia, jumlah anggota dewan komisaris harus disesuaikan dengan kompleksitas perusahaan dengan tetap memperhatikan aktivitas dalam pengambilan keputusan.

Sembiring (2005) menyatakan bahwa semakin besar ukuran dewan komisaris maka pengendalian dan monitoring yang dilakukan akan semakin efektif sehingga tekanan terhadap manajemen untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan akan semakin besar. Villiers *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki ukuran dewan komisaris semakin besar akan memiliki kinerja perusahaan yang semakin baik. Villiers *et al.* (2009) menemukan ada hubungan positif signifikan antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja lingkungan.

H1: Ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan.

Proporsi Dewan Komisaris Independen dan Kinerja Lingkungan

Anggota dewan komisaris diangkat dan diberhentikan oleh Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) melalui proses yang transparan. Penelitian yang dilakukan oleh Webb (2004) dalam Said *et al.* (2009) menunjukkan bahwa dewan komisaris independen memainkan peran penting dalam meningkatkan kinerja tanggung jawab sosial dan lingkungan perusahaan. Baysinger dan Butler (1985) dalam Villiers *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa perusahaan yang memiliki dewan komisaris independen yang lebih besar, memiliki kinerja yang unggul. Villiers *et al.* (2009) juga mengungkapkan adanya hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan kinerja lingkungan karena direksi yang independen dinilai efektif dalam memonitor kinerja lingkungan perusahaan. Dewan komisaris independen juga cenderung kritis menilai keputusan manajemen tentang kegiatan lingkungan dan mencegah tindakan yang dapat menyebabkan pelanggaran lingkungan sehingga tercipta kinerja lingkungan yang lebih baik (Villiers *et al.*, 2009).

H2: Proporsi dewan komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris dan Kinerja Lingkungan

Dalam rangka menjalankan tugasnya, dewan komisaris mengadakan rapat rutin untuk membahas masalah mengenai arah dan strategi perusahaan, mengevaluasi kebijakan-kebijakan yang diambil oleh dewan direksi, dan mengatasi masalah benturan kepentingan (FCGI 2002 dalam Ratnasari dan Prastiwi 2011). Rapat dewan komisaris merupakan hasil keputusan bersama baik antara sesama anggota dewan komisaris, atau dengan dewan direksi untuk menentukan kebijakan perusahaan. Proses rapat dewan komisaris (*board process*) yang baik harus diakhiri dengan membacakan kesimpulan dan keputusan rapat. Hal ini digunakan untuk menghindari ketidakjelasan mengenai kesimpulan dan keputusan rapat bagi semua anggota rapat, dan dapat

dijadikan sebagai dokumen formal untuk mengambil langkah-langkah yang disetujui dalam rapat (Muntoro 2006).

Penelitian Brick dan Chidambaran (2007) menunjukkan bahwa semakin banyak frekuensi rapat dewan komisaris, maka akan berpengaruh baik terhadap kinerja perusahaan termasuk kinerja sosial dan lingkungannya. Prasetyo (2008) mengungkapkan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat maka kinerja dewan komisaris dalam hal pengawasan akan semakin baik, hal tersebut diharapkan mampu meningkatkan kinerja perusahaan. Waryanto (2010) juga menambahkan bahwa semakin sering dewan komisaris mengadakan rapat, maka fungsi pengawasan akan semakin efektif sehingga kinerja perusahaan juga semakin baik.

H3: Jumlah rapat dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan.

Ukuran Komite Audit dan Kinerja Lingkungan

Komite audit memiliki tanggung jawab untuk memilih auditor independen, mengawasi proses audit, dan meyakinkan integritas dari pelaporan keuangan. Dalam Surat Edaran Ketua Bapepam No. Kep-29/PM/2004 tentang "Komite Audit" menyatakan bahwa emiten atau perusahaan publik wajib memiliki komite audit. Komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris dalam rangka membantu melaksanakan tugas dan fungsinya, sehingga komite audit bertanggungjawab kepada dewan komisaris.

Said *et al.* (2009) mengungkapkan bahwa komite audit adalah komite yang dibentuk oleh dewan komisaris untuk melakukan tugas pengawasan pengelolaan perusahaan termasuk dalam pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungannya. Dalam bidang lingkungan, perusahaan juga dapat terhindar dari sanksi yang diberikan pemerintah apabila lalai atau tidak melaksanakan apa yang tercantum dalam PP No 47 tahun 2012 tentang "Tanggung Jawab Sosial dan Lingkungan". Hal tersebut sesuai dengan penelitian Focker (1992) dalam Setiawan (2012) yang menemukan bahwa komite audit dianggap sebagai alat yang efektif untuk melakukan mekanisme pengawasan, sehingga dapat meningkatkan kinerja perusahaan terutama kinerja lingkungannya.

H4: Ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan.

METODE PENELITIAN

Populasi dan Sampel Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti memilih populasi pada perusahaan *food* dan *beverage*, manufaktur, dan tambang yang terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI). Alasan peneliti memilih perusahaan *food* dan *beverage,* manufaktur, dan tambang adalah karena perusahaan dirasa dapat menimbulkan dampak terhadap lingkungan alam dan sosial yang relatif tinggi sehingga penilaian terhadap kinerja lingkungan sangat diperlukan oleh perusahaan (Yesika 2013). Teknik pemilihan sampel yang digunakan adalah *purposive sampling* dengan kriteria yang telah ditetapkan oleh peneliti.

Tabel 1

Kriteria Pengambilan Sampel

Kriteria	Jml
Perusahaan *food* dan *beverage*, manufaktur, dan tambang yang terdaftar di BEI tahun 2011-2013.	450
Perusahaan *food* dan *beverage* manufaktur, dan tambang yang menerbitkan *annual report* pada tahun 2011-2013.	450
Perusahaan menggunakan mata uang rupiah	450
Perusahaan tidak berperingkat PROPER tahun 2011	(111)
Perusahaan tidak berperingkat PROPER tahun 2012	(97)
Perusahaan tidak berperingkat PROPER tahun 2013	(89)
Perusahaan tidak rutin berperingkat PROPER tahun 2011-2013	(45)
Total Sampel	108

Definisi Operasional dan Pengukuran Variabel

Ukuran Dewan Komisaris

Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 mendefinisikan dewan komisaris sebagai organ perusahaan bertugas dan bertanggung jawab secara kolektif untuk melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi serta memastikan bahwa perusahaan melaksanakan GCG. Ukuran dewan komisaris diukur berdasarkan jumlah total dewan komisaris yang dimiliki perusahaan, yang terdiri dari komisaris utama, komisaris independen, dan komisaris.

Proporsi Komisaris Independen

Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 mendefinisikan komisaris independen didefinisikan sebagai anggota dewan komisaris yang tidak terlibat dalam kegiatan sehari-hari di suatu perusahaan (bukan manajer atau karyawan). Proporsi komisaris independen diukur berdasarkan persentase (%) antara jumlah anggota komisaris independen dibandingkan dengan total anggota dewan komisaris.

Jumlah Rapat Dewan Komisaris

Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 mendefinisikan rapat dewan komisaris merupakan pertemuan antara anggota dewan komisaris yang digunakan sebagai sarana komunikasi dan koordinasi untuk menjalankan tugasnya sebagai pengawas manajemen. Jumlah rapat dewan komisaris diukur berdasarkan total rapat yang dilaksanakan secara intern antar dewan komisaris perusahaan pada tiap tahunnya.

Ukuran Komite Audit

Pedoman Umum GCG Indonesia Tahun 2006 mendefinisikan ukuran komite audit mengacu pada jumlah anggota komite audit yang dimiliki oleh perusahaan. Indikator yang digunakan mengacu pada penelitian Waryanto (2010), yaitu ukuran komite audit sama dengan jumlah anggota komite audit yang dimiliki perusahaan.

Kinerja Lingkungan

Kinerja lingkungan perusahaan diukur dengan Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup, yang disingkat PROPER merupakan salah satu upaya yang dilakukan oleh Kementerian Lingkungan Hidup (KLH) untuk mendorong PROPER menggunakan peringkat untuk mengukur kinerja lingkungan perusahaan. Pada penelitian ini menggunakan skor sesuai dengan kategori yang disimbolkan menggunakan warna sebagai pemeringkatnya. Kriteria dalam peringkat PROPER adalah Peringkat Emas (Skor 5), Peringkat Hijau (Skor 4), Peringkat Biru (Skor 3), Peringkat Merah (Skor 2) dan Peringkat Hitam (Skor 1).

Variabel Kontrol

Size

Ukuran perusahaan menunjukkan besar kecilnya suatu perusahaan. Dalam penelitian ini, ukuran perusahaan diukur menggunakan total aset yang dimiliki perusahaan sampai akhir periode. Total aset akan ditransformasikan dalam logaritma natural untuk menghindari fluktuasi data yang berlebihan atau dapat dirumuskan menjadi. *Size* = log(total aset)

Profitabilitas

Profitabilitas digunakan untuk mengukur efisiensi aktivitas perusahaan dan kemampuan perusahaan untuk memperoleh keuntungan. Untuk menghitung profitabilitas perusahaan, penelitian ini menggunakan ROA (*return on asset*) dengan rumus:

$$\text{ROA} = \frac{\text{Laba bersih}}{\text{Total aset}}$$

Leverage

Leverage merupakan alat untuk mengukur seberapa besar perusahaan tergantung pada kreditur dalam membiayai aset perusahaan. Rasio ini diukur dengan rumus:

$$\text{Leverage} = \frac{\text{Total Hutang}}{\text{Total aset}}$$

ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskripstif

Berdasarkan statistik deskriptif tersebut variabel kinerja lingkungan memiliki nilai minimal 2 dan niai maksimal 5. Nilai *mean*

sebesar 3.3 dengan standar deviasi sebesar 0.701 menunjukkan bahwa dari 108 data yang ada, yang terdiri dari 36 perusahaan memiliki peringkat PROPER yang cukup atau berada pada tingkat yang disimbolkan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dengan warna biru.

Variabel ukuran dewan komisaris memiliki nilai minimum 1 (satu) dan nilai maksimal 13, *mean* dari ukuran dewan komisaris adalah sebesar 5 dengan standar deviasi 2.4550. Variabel proporsi komisaris independen memiliki nilai minimum sebesar 23.07% dan nilai maksimal sebesar 100%. Variabel ini memiliki nilai *mean* sebesar 37.7627 dengan standar deviasi sebesar 12.9609. Variabel jumlah rapat dewan komisaris memiliki nilai minimum 1 dan nilai maksimal 14. Hasil pengujian ini juga menunjukkan variabel memiliki nilai *mean* sebesar 3.8915 atau dibulatkan menjadi 4 dengan standar deviasi sebesar 2.4187. Variabel ukuran komite audit memiliki nilai minimum 3 dan nilai maksimal 6, nilai rata-rata (*mean*) sebesar 3.3889 atau dibulatkan menjadi 3 dengan standar deviasi sebesar 0.7213.

Variabel kontrol *size* memiliki nilai minimum 4.7 dan nilai maksimal 7.96, nilai *mean* sebesar 6.7043 dengan standar deviasi sebesar 0.78231. Profitabilitas memiliki nilai minimal sebesar -15.3 dan nilai maksimal 25.94, nilai *mean* sebesar 6.4734 dengan standar deviasi sebesar 8.7739. *Leverage* memiliki nilai minimal sebesar 0.1 dan nilai maksimal sebesar 2.17, nilai *mean* sebesar 0.5282 dengan standar deviasi sebesar 0.3378.

Tabel 2
Hasil Uji Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std Dev
Dewan Komisaris	108	1	13	5.472	2.455
Komisaris Independen	108	23.07	100	37.76	12.961
Rapat Dewan Komisaris	108	1	14	3.892	2.419
Komite Audit	108	3	6	3.389	0.721
Size	108	4.7	7.96	6.704	0.782
Profitabilitas	108	-15.3	25.94	6.473	8.774
Leverage	108	0.1	2.17	0.528	0.338
Kinerja Lingkungan	108	2	5	3.3	0.701
Valid N (*listwise*)	108				

Analisis Asumsi Klasik

Uji Normalitas Data

Penelitian ini menggunakan analisis statistik untuk menguji normalitas data. Nilai residual dalam penelitian terdistribusi secara normal karena memiliki nilai *Asymp.Sig* (2-tailed) sebesar 0.191 atau melebihi signifikansi 0.05.

Uji Multikolinearitas

Pada pengujian *tolerance* menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai *tolerance* kurang dari 0,10. Hasil perhitungan VIF menunjukkan bahwa tidak ada variabel independen yang memiliki nilai VIF lebih dari 10. Hasil tersebut menunjukkan tidak terjadi multikoliearitas pada data yang digunakan.

Uji Heteroskedastisitas

Data yang dipakai tidak mengalami heterokedastisitas karena nilai probabilitas signifikansi dari semua variabel yang digunakan berada di atas tingkat kepercayaan 0.05 atau 5%.

Uji Autokorelasi

Pada penelitian ini uji autokorelasi menggunakan alat uji *Runs Test*, dengan hasil yang menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0.122. hasil ini membuktikan bahwa data yang digunakan tidak mengalami autokorelasi.

Uji Regresi dan Uji Hipotesis

Uji F

Hasil analisis menunjukkan bahwa *goodness of fit model* cukup memadai dengan F-*value* sebesar 4.104 dengan signifikansi 0,001. Nilai *adjusted* R^2 sebesar 0.169, nilai tersebut mempunyai arti 16.9% variasi kinerja lingkungan dapat dijelaskan secara signifikan oleh ukuran dewan komisaris, proporsi komisaris independen, jumlah rapat dewan komisaris, dan ukuran komite

audit sedangkan sebesar 83.1% yang lain, kinerja lingkungan dijelaskan oleh variabel lain. Uji F-test ini menunjukkan bahwa, model regresi dapat digunakan untuk memprediksi kinerja lingkungan.

Uji t

Hasil analisis regresi tidak sesuai dengan prediksi hipotesis H1, H3, H4. Hipotesis 1 memprediksi bahwa ukuran dewan komisaris berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan secara empiris tidak didukung dengan nilai t hitung sebesar 0.296 (α >5%). Tabel di atas menunjukkan bahwa prediksi Hipotesis 3 (H3) bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan secara empiris tidak didukung dengan nilai t hitung sebesar 0.708 (α > 5%). Selain itu data empiris juga tidak menunjukkan bahwa ukuran komite audit berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan secara empiris tidak didukung dengan t hitung sebesar 0.420 (α > 5%). Sedangkan pengujian hipotesis kedua memiliki nilai signifikan sebesar 0.000 (α < 5%) menunjukkan bahwa hipotesis kedua diterima. Hasil ini menunjukkan bahwa secara positif proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja lingkungan.

Variabel Kontrol

Tabel 7 menunjukkan nilai signifikan dari variabel kontrol *size* sebesar 0,087 > 0.05, maka dapat disimpulkan variabel kontrol *size* tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Variabel kontrol profitabilitas memiliki nilai signifikan sebesar 0.027 < 0.05. Hasil ini menunjukkan bahwa variabel kontrol profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Variabel kontol *leverage* menunjukkan nilai signifikan sebesar 0,237 > 0.05, dapat disimpulkan bahwa variabel kontrol *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Dari hasil uji t diketahui hanya variabel kontrol yang signifikan terhadap kinerja lingkungan, maka dapat disimpulkan bahwa semakin tinggi profitabilitas akan meningkatkan kinerja lingkungan.

Pengaruh ukuran dewan komisaris terhadap kinerja lingkungan

Tabel 7

Hasil Analisis Regresi

Model	UnStd Coef.		Std. Coef.	t	Sig.
	B	Std. Error	Beta		
(Constant)	0.715	0.749		0.954	0.34
Dewan Komisaris	0.032	0.03	0.112	1.051	0.29
Komisaris Independen	0.021	0.005	0.389	4.087	0.00
Rapat DK	-0.013	0.034	-0.044	-0.376	0.71
Komite Audit	0.089	0.11	0.092	0.81	0.42
Size	0.167	0.096	0.186	1.728	0.08
Profitabilitas	0.018	0.008	0.219	2.248	0.03
Leverage	0.246	0.207	0.119	1.189	0.24

Pengujian one-tailed test. F-test (goodness of fit model): 4.104 (0,001).
Adj. R2: 0,169

Hasil pengujian empiris hipotesis 1 menunjukkan bahwa ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Hal tersebut menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap baik tidaknya kinerja lingkungan. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Yesika (2013) yang menemukan bahwa tidak terdapat pengaruh antara ukuran dewan komisaris dengan kinerja lingkungan.

Kartini (2009) mengungkapkan bahwa efektivitas mekanisme pengawasan dan pengendalian yang dilakukan oleh dewan komisaris tergantung pada nilai, norma dan kepercayaan yang diterima dalam suatu organisasi bukan pada jumlah dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Berdasarkan Kartini (2009) diketahui bahwa semakin tinggi penerapan nilai, norma, dan kepercayaan dalam suatu perusahaan. Maka akan meningkatkan efektivitas pengawasan dan pengendalian, termasuk pengawasan dan pengendalian terhadap kinerja lingkungan perusahaan.

Selain itu, hasil penelitian ini juga didukung oleh Setiawan (2012) yang menemukan bahwa salah satu alasan ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan adalah karena terjadi perbedaan tujuan diantara dewan

komisaris dan dewan direksi. Dimana dewan komisaris menginginkan perusahaan untuk meningkatkan kinerja lingkungannya, sementara dewan direksi memfokuskan pada peningkatan keuntungan perusahaan.

Pengaruh proporsi komisaris independen terhadap kinerja lingkungan

Berdasarkan hasil pengujian empiris diketahui bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh positif terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Hasil pengujian ini sejalan dengan penelitian Yesika (2013) yang menemukan bahwa proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja lingkungan, karena komisaris independen lebih sensitif terhadap kinerja sosial dan lingkungan perusahaan.

Sejalan dengan penelitian Villiers *et al*. (2009) yang menunjukkan adanya hubungan positif antara dewan komisaris independen dengan kinerja lingkungan karena komisaris yang independen dinilai efektif dalam memonitor kinerja lingkungan perusahaan. Lebih lanjut lagi, dewan komisaris independen juga cenderung kritis menilai keputusan manajemen tentang kegiatan lingkungan dan mencegah tindakan yang dapat menyebabkan pelanggaran lingkungan sehingga tercipta kinerja lingkungan yang lebih baik.

Dalam Pedoman Umum *Good Corporate Governance* Indonesia Tahun 2006 dijelaskan bahwa setiap perusahaan minimal memiliki 30% komisaris independen dari total dewan komisaris yang dimiliki perusahaan. Hal ini menunjukkan pentingnya fungsi komisaris independen dalam perusahaan untuk mengontrol manajemen dalam membuat kebijakan. Kebijakan yang diantaranya adalah tetap melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungannya, serta tidak melakukan kegiatan yang akan merugikan lingkungan sosial dan alam disekitar perusahaan.

Pengaruh jumlah rapat dewan komisaris terhadap kinerja lingkungan

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya frekuensi dewan komisaris melakukan rapat tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Hasil penelitian ini tidak sejalan dengan Setiawan (2012) serta Stuebs dan Sun (2014) yang mengungkapkan bahwa rapat dewan komisaris berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Hal itu dikarenakan semakin banyak dewan komisaris melakukan rapat, maka proses monitoring terhadap kinerja manajemen akan semakin baik termasuk juga kinerja lingkungan.

Jumlah rapat dewan komisaris menjadi tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan, dikarenakan terdapat kemungkinan dewan komisaris melakukan rapat hanya untuk memenuhi kewajibannya sebagai pengawas dan pengendali kinerja perusahaan. Selain itu, perlu diketahui juga bahwa agenda rapat yang dilakukan dewan komisaris benar-benar membahas mengenai tanggung jawab sosial dan lingkungan. Tidak hanya untuk memenuhi peraturan yang mewajibkan bahwa setiap perusahaan minimal melaksanakan rapat dewan komisaris sebanyak 2 (dua) kali dalam satu tahun.

Pengaruh ukuran komite audit terhadap kinerja lingkungan

Hasil pengujian empiris menunjukkan bahwa ukuran komite audit tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa banyak atau sedikitnya jumlah komite audit yang dimiliki perusahaan tidak berpengaruh terhadap kinerja perusahaan terutama kinerja lingkungannya. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan Setiawan (2012) yang menemukan bahwa komite audit tidak berpengaruh pada baik atau tidaknya kinerja lingkungan. Hal ini dikarenakan komite audit sebagai bagian dari pengawas perusahaan tidak akan fokus dalam pengawasan kinerja lingkungan. Komite audit akan lebih fokus untuk mengembangkan perusahaan seperti apa yang menjadi prioritas dari dewan direksi.

hanya memiliki 3 orang komite audit. Perusahaan memiliki komite audit hanya untuk memenuhi peraturan Badan Pengawas Pasar Modal (BAPEPAM) Nomor IX.I.5 tentang pembentukan dan pedoman pelaksanaan kerja komite audit, serta untuk memenuhi Pedoman Umum *Good Cor–*

porate Governance Indonesia Tahun 2006 tentang komite audit.

SIMPULAN

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Ukuran dewan komisaris, Jumlah rapat dewan komisaris, Ukuran dewan komisaris tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Sedangkan proporsi komisaris independen berpengaruh terhadap kinerja lingkungan perusahaan. Variabel kontrol profitabilitas berpengaruh terhadap kinerja lingkungan, sedangkan *size* dan *leverage* tidak berpengaruh terhadap kinerja lingkungan.

KETERBATASAN DAN SARAN

Keterbatasan

Perusahaan tidak secara rutin terdaftar pada peringkat PROPER dalam periode penelitian. Sehingga, mengurangi jumlah sampel yang digunakan. Perusahaan tidak secara rutin terdaftar pada peringkat PROPER, karena kurangnya perhatian dan transparansi dalam melaporkan hasil pelaksanaan tanggung jawab terhadap lingkungan kepada Kementerian Lingkungan Hidup.

Saran

Untuk penelitian selanjutnya, disarankan untuk mencoba menggunakan kriteria penilaian kinerja lingkungan lain, dimana perusahaan yang menjadi sampel penelitian terdaftar secara rutin. Untuk perusahaan diharapkan untuk lebih memperhatikan kegiatan operasionalnya agar dapat meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Selain itu juga diharapkan untuk melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan lebih baik.

DAFTAR PUSTAKA

Abeysekera, I. 2006. The Project of Intellectual Capital Disclosure: Researching the Research. *Journal of Intellectual Capital*, 7 (1): 61-77.

BAPEPAM. 2012. No. Kep-643/BL/2012 tentang Pembentukan dan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit.

Baysinger, B.D. dan H.N. Butler. 1985. Corporate Governance and the Board of Directors: Performance Effects of Changes in Board Composition. *The Journal of Law, Economics and Organization*, 1 (1): 101-124.

Brick dan Chidambaran. 2007. *Board Meetings, Committee Structure, and Firm Performance*. Newark: Rutgers University.

Daniri, M.A. 2008c. *Standarisasi Tanggung Jawab Sosial Perusahaan (Bag III stuen– Finish)*. Available at: http://www.madani-ri.com/2008/02/11/standarisasi-tanggung-jawabsosial-perusahaan-bag-iii-finish/.

Djatmiko, A. 2006. *Pengaruh Sikap Wajib Pajak pada Pelaksanaan Sanksi Denda, Pelayanan Fiskus dan Kesadaran Perpajakan terhadap Kepatuhan Wajib Pajak (Studi Empiris terhadap Wajib Pajak Orang Pribadi di Semarang)*. Tesis, Program S2 Magister Akuntansi Universitas Diponegoro, Semarang.

Effendi, M.A. 2009. *The Power of Corporate Governance: Teori dan Implementasi*. Jakarta: Salemba Empat.

Elkington, J. 1997. *Cannibals with forks The Tripple Bottom Line of 21 Century Bussiness*. Oxford: Capstone Publishing Ltd.

Kartini, Dwi. 2009. *Corporate Social Responsibility Transformasi Konsep Sustainibility Management dan Implementasi di Indonesia*. Bandung: PT Refika Aditama.

Kementerian Lingkungan Hidup. 2013. *Program Penilaian Peringkat Kinerja Perusahaan dalam Pengelolaan Lingkungan Hidup: Laporan Hasil Penilaian*. Press Release PROPER 2013.

Linoputri, F.P. 2010. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Penerimaan Opini Audit Going Concern*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Muntoro, R.K. 2006. *Membangun Dewan Komisaris yang Efektif*. Jakarta: Lembaga Manajemen Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Nasution, M. dan D. Setiawan. 2007. *Pengaruh Corporate Governance terhadap Manajemen Laba di Industri Perbankan Indonesia*. Simposium Nasional Akuntansi X, Makassar, Indonesia.

Prasetyo, R.B. 2008. *Ketimpangan dan Pengaruh Infrastruktur terhadap Pembangunan Ekonomi*. Skripsi, Sarjana Ekonomi IPB, Bogor.

Ratnasari, Y. dan Prastiwi. 2011. *Pengaruh*

Corporate Governance Terhadap Luas Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial Perusahaan di dalam Sustainability Report. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Said, *et al*. 2009. The Relationship between Corporate Governance Characterictics in Malaysian Public Listed Companies. *Social Responsibity Journal*, 5 (2): 212-226.

Sembiring, E.R. 2005. *Karakteristik Perusahaan dan Pengungkapan Tanggung Jawab Sosial: Studi Empiris pada Perusahaan yang Tercatat di Bursa Efek Jakarta*. Simposium Nasional Akuntansi VIII, Solo, Indonesia.

Setiawan, B. 2012. *Analisis Pengaruh Praktik Good Corporate Governance dan Manajemen Laba Terhadap Corporate Environmental Disclosure*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Solihin, I. 2009. *Corporate Social Responsibility from Charity to Sustainability*. Jakarta: Salemba Empat.

Stuebs, Jr. dan L. Sun. 2014. Corporate Governance and Environmental Activity. *Advances in Environmental Accounting and Management*, 5: 81-113.

Surya, I. dan Yustivanda. 2006. *Penerapan Good Corporate Governance Mengesampingkan Hak–Hak Istimewa dan Kelangsungan Usaha*. Jakarta: Kencana Prenada Media Grup.

Utama, I. 2007. *Mekanisme Good Corporate Governance*. Jakarta.

Villiers, C.D., V. Naiker dan C. Staden. 2009. *Good Corporate Governance Makes for Good Environmental Performance*. AFAANZ Conferense, New Zealand, Juli 2009.

Waryanto. 2010. *Pengaruh Karakteristik GCG terhadap Pengungkapan CSRDi Indonesia*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.

Yesika, N. 2013. *Pengaruh Mekanisme Corporate Governance dan Karakteristik Perusahaan terhadap Kinerja Lingkungan*. Skripsi, Universitas Diponegoro, Semarang.